

TESIS

IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEJABAT YANG BERWENANG

:

Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp

OLEH:

NAMA : ALVIN RAMADHAN NUR LUIS
NIM : 1520112004
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
P.K. : HUKUM PIDANA
PEMBIMBING I : PROF. DR. H. ELWI DANIL, S.H., M.H.
PEMBIMBING II : Dr. SHINTA AGUSTINA, S.H., M.H.



PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA PEJABAT YANG BERWENANG.

(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp)

(Alvin Ramadhan Nur Luis, 1520112004, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 100 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masyarakat di Indonesia menjadikan hukum Agama dan Adat masing-masing sebagai dasar dalam melaksanakan Perkawinan, setelah kelahiran UU Perkawinan Perkawinanpun masih tetap dianggap Sah apabila dilakukan menurut Agama yang dianut dan hal tersebut diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut, namun aturan tersebut ditambahkan dengan ketentuan agar Perkawinan tersebut dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Banyak Masyarakat yang tidak mendaftarkan Perkawinannya kepada pejabat yang berwenang dengan berbagai macam alasan, sehingga masyarakat tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang optimal dari Negara khususnya perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek UU PKDRT, dengan menggunakan metodologi penelitian *yuridis normatif*. Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus Hasil penelitian yang diperoleh *Pertama*, Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia secara *Implisit* tidak diakui ataupun dikenal. *Kedua*, Korban kekerasan yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak mendapatkan perlindungan UU PKDRT. Kesimpulan: *Pertama*, Perkawinan secara agama diakui dalam PerUndang-Undangan di Indonesia , namun agar perlindungan hukum bagi pasangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal maka hendaknya Perkawinan secara agama itu juga tetap didaftarkan kepada pejabat yang berwenang agar Perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan UU PKDRT. *Kedua*, Perkawinan yang tidak dicatatkan didalam Aspek UU PKDRT tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana Perkawinan yang dicatatkan, namun tujuan dari hukum pidana adalah mencari kebenaran yang hakiki, sehingga apabila diketahui suatu perkawinan benar telah terjadi namun tidak dicatatkan maka hendaknya Majelis Hakim menganggap Perkawinan itu adalah kebenaran yang hakiki, sehingga UU PKDRT dapat diterapkan dalam Perkara Pidana Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Pdp.

Kata Kunci : *Perkawinan, Rumah Tangga, KDRT.*

THE IMPLICATION OF DOMESTIC VIOLENCE TOWARDS UNREGISTERED MARRIAGES

(Case Study Of Criminal Case Number 45 / PID.B / 2014 / PN.PDP)

**(Alvin Ramadhan Nur Luis, 1520112004, Master of Legal Studies, Faculty of Law
University of Andalas, 100 Page, 2017)**

ABSTRACT

Before the existence of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (Marriage Law), the people in Indonesia make the law of Religion and social respectively as the basis in carrying out Marriage, after the existence of Marriage Law Marriage still be considered Legal if done according to Religion embraced and It is regulated in Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law, but the rules are added with the provision that the marriage be registered to the competent authority as regulated in Article 2 Paragraph (2) of the Marriage Law. Many Communities do not register their marriages to authorized officials for various reasons, so that the public does not get optimal protection from the State especially protection within the scope of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). This study aims to find out how marital status is not listed by law applicable in Indonesia and how Legal Protection against Victims of Domestic Violence on Marriage is not recorded from Aspect of UU PKDRT. Using normative juridical research methodology. The material of law used is material of law secondary, that is material of law supporting the information or supporting the completeness of Primary material of law obtained from libraries and collections of authors personal libraries conducted by literature study or literature. Data analysis used normative analysis, that collected data poured in the form of logical and systematic description, then analyzed to get clarity of problem solving, then draw deductive conclusion, that is from things which is general to things that are special Result of research obtained First , A marriage not registered to an authorized official under Indonesian law is explicitly unrecognized or otherwise known. Second, Victims of violence whose marriages are not registered do not get protection from the PKDRT Law. Conclusion: First, Marriage is religiously acknowledged in Indonesian Laws, but in order for the legal protection of the couple to be applied maximally then religious marriage should also be registered to the competent authority in order for the marriage to be protected by UU PKDRT. Secondly, marriage which is not listed in Aspect of UU PKDRT does not get the protection as registered marriage, but the purpose of criminal law is to find the ultimate truth, so that if a marriage is true has happened but not registered then the Panel of Judges should consider the Marriage is the truth Essential, so that UU PKDRT can be applied in Criminal Case Number 45 / Pid.B / 2014 / PN.Pdp.

Keywords: Marriage, Household, Domestic Violence.